

Judul : Revisi UU Kepariwisataan: Angin Segar Ubah Filosofi Pariwisata
Tanggal : Kamis, 14 Maret 2024
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 9

Revisi UU Kepariwisataan Angin Segar Ubah Filosofi Pariwisata

KOMISI X DPR tengah menggarap Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepariwisataan. RUU ini diharapkan bisa menjadi satu paket regulasi yang mampu melindungi harmoni antara manusia, alam, dan inovasi teknologi.

Wakil Ketua Komisi X DPR Agustina Wilujeng Prames-tuti mengatakan, pihaknya menyerap aspirasi masyarakat untuk memperkaya nas-kah akademik agar kebijakan yang dilahirkan mencerminkan prinsip lestari.

Komunikasi intens dilakukannya demi menggali dan menyerap masukan dari para narasumber agar RUU Kepariwisataan bisa diimplementasikan sesuai kebutuhan masyarakat.

"Kami memahami bahwa negara wajib mempertahankan kekayaan budaya, sejarah, cagar budaya, serta memperhatikan kondisi sosial masyarakat setempat dengan tetap memelihara kekayaan alam dan keberlanjutan lingkungan," tutur Agustina saat membuka Rapat Dengar Pendapat Umum Panja RUU Kepariwisataan Komisi X DPR dengan Ditjen

visi atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Revisi ini merupakan usulan dari DPR dan DPD. Hingga kini, Panja RUU Kepariwisataan sedang berupaya menyerap sebanyak-banyaknya aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat.

RUU Kepariwisataan bisa membawa 'angin' baru berupa konsep kepariwisataan dalam lingkup suatu kawasan serta filosofis kepariwisataan yang sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi terkini.

Sementara, anggota Komisi X DPR Ledia Hanifa Amaliah mengingatkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengubah paradigma pemerintah daerah dalam mengelola potensi pariwisata. Hal ini menjadi sorotannya karena pemerintah daerah dinilai masih memandang sebelah mata dampak dari potensi pariwisata.

Jika Pemerintah Daerah serius menggarap dan mengelola pariwisata secara berkelanjutan, maka kredibilitas pariwisata Indonesia akan semakin menguat sekaligus

Komisi X DPR dengan Ditjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2024).

Lebih lanjut, anggota Fraksi PDI-Perjuangan itu juga sepakat jika nilai inklusivitas masuk sebagai landasan dalam penyusunan RUU Kepariwisataan. Dia menilai, adanya nilai inklusivitas ini akan menjadi salah satu pendorong kuat untuk meregulasi investasi demi revitalisasi pariwisata.

Sebagai informasi, RUU Kepariwisataan adalah re-

semakin menguat sekaligus mendatangkan berbagai peluang yang akan berpengaruh signifikan terhadap roda perekonomian daerah, sehingga sektor pariwisata bisa menjadi tulang punggung bagi negara.

Anggota Fraksi PKS itu juga sepakat jika pemerintah pusat dan daerah perlu bersama menyusun rencana dan strategi untuk memperkuat fondasi pariwisata, termasuk terkait pembangunan infrastruktur pariwisata.

Dia berharap kolaborasi ini bisa mempercepat pemerataan dalam konteks pariwisata. ■ KAL